

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL

Dea Claudia Amanda Pardede

DeaClaudia383@yahoo.com

Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Changes of forms within Indonesian government in which it was a centralized at the beginning, now it has changed into a decentralized structure, Wide rights and authorities are given to the Local governments to take care of their own household and they are required to be able to maximize the potencies that are owned by the local government. This research is to find out whether the Local Own Source Revenue which is the original source of revenue the local government give influence to the sCapital Expenditure and Balancing Fund in which it is a transfer fund which have been obtained from central government which give influence to the Capital Expenditure. The population is all districts / cities in Gerbang Kertosusila. The data is the secondary data which has been obtained from the Districts/ Cities Budget Realization Report in Gerbang Kertosusila. Based on the predetermined criteria, 35 samples from 7 districts / cities in Gerbang Kertosusila have been obtained as samples, with 5 years observation periods from 2012 to 2016. Based on the result of the test, it indicates that the Local Own Source Revenue and Balancing Fund give positive influence to the Capital Expenditure.

Keywords: Local Own Source Revenue, Balancing Fund, Capital Expenditure

ABSTRACT

Penelitian ini untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penghasilan asli dari pemerintah daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Perimbangan yang merupakan dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Gerbang Kertosusila. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Gerbang Kertosusila. Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 35 dari 7 Kabupaten/Kota di Gerbang Kertosusila, dengan jangka waktu pengamatan 5 tahun dari periode 2012-2016. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Secara simultan, variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Sejak reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Reformasi yang bergulir pada tahun 1998, kondisi pemerintahan cenderung dinamis. Bermunculan terobosan baru yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yang berkaitan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan tentang memberi hak dan kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat yang berkembang di daerah dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.

Pemberian otonomi daerah tersebut berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan- kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan Ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Kebijakan desentralisasi yang selanjutnya lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah ini lahir karena melihat perkembangan kondisi di dalam negeri yang menunjukkan keinginan dari rakyat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Selain itu kondisi dunia secara global pun mengindikasikan semakin kuatnya arus globalisasi yang tentunya menuntut adanya daya saing yang kuat antar tiap negara. Upaya penguatan daya saing negara secara umum dapat dicapai bila pemerintah daerahnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada di daerah sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah. Maka dari itu tujuan program otonomi daerah sendiri adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian 2006).

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah lebih berhak dalam membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Peningkatan hak dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahannya. Peningkatan tanggung jawab disini diantaranya adalah upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian pemerintah daerah meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai program-program yang dijalankannya karena memang peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diarah melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan daerah yang semakin baik (Halim 2001:2).

Secara implisit, peraturan perundang-undangan merupakan perjanjian antara eksekutif, legislative, dan publik. Dimana dalam penetapan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan tegas memisahkan fungsi Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Dimana Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang mempunyai kewajiban membuat rancangan APBD, Sedangkan legislatif mempunyai kewajiban mensahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rumah tangganya secara mandiri serta pelaksanaan pelayanan publik, maka dibentuklah anggaran daerah.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 ayat Undang-Undang No.33 Tahun 2004 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA); penerimaan Pinjaman Daerah; Dana Cadangan Daerah; dan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam UU no 33 tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan setiap masing-masing daerah. Perimbangan keuangan sebenarnya memiliki pengertian yang cukup luas, yaitu bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam suatu bentuk keadilan horizontal maupun vertical dan berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah seperti dari sisi keuangan yang lebih baik menuju terwujudnya *good governance*. Dengan demikian desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Namun perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada Dana Bantuan dari Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan saja.

Sehingga Peningkatan PAD juga diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan sumber pendanaan atau ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan sumber pendanaan ini Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dana Perimbangan ini bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan juga digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintah daerah serta untuk meminimalisasi resiko terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*).

Dalam mengukur keberhasilan pengembangan otonomi di daerah, dapat dilihat dengan cara membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan APBD yang diterima setiap tahunnya. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari suatu daerah tersebut mampu memberikan kontribusi terbesar dalam pemasukan belanja daerah, maka

dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang cukup maju dan bagus dari sektor ekonomi dan begitu pula sebaliknya. Di satu pihak beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial bagi daerahnya. Di lain pihak, banyak daerah yang memiliki kemampuan finansial yang jauh memadai sehingga mengakibatkan daerah-daerah semacam ini mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya, sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik. Pergeseran dalam komposisi belanja daerah merupakan upaya yang logis dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini bertujuan untuk meningkatkan asset tetap yang berupa peralatan, bangunan, dan infrastruktur. Semakin tinggi investasimodal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang meneliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian belanja modal. Maka, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL**" (Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Gerbang Kertosusila).

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah berpengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanjamodal di Pemerintahan Kabupaten/Kota Gerbang Kertosusila? (2) Apakah berpengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal di Pemerintahan Kabupaten/Kota Gerbang Kertosusila?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Pemerintahan Kabupaten/Kota Gerbang Kertosusila. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal di Pemerintahan Kabupaten/Kota Gerbang Kertosusila

TINJAUAN TEORITIS

Otonomi Daerah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia tumbuh semakin pesat seiring dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, hal ini merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratisasi dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (Maimunah, 2006). Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya. Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan

dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Darise, 2009).

Menurut Mardiasmo (2002) Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah terkandung tiga misi yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Desentralisasi Fiskal

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 8, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi yang artinya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, yakni menggali PAD dan mengelola keuangannya. Di samping itu, pemerintah daerah berhak untuk menerima transfer keuangan dari pemerintahan pusat. Transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu berupa Dana Perimbangan.

Anggaran Daerah

Anggaran menurut Mardiasmo (2002) adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah adalah salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Walidi, 2009). Menurut Bahtiar (2002:14) anggaran merupakan satu instrumen penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun di kegiatan organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Anggaran mempunyai beberapa karakteristik yaitu: Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan, Anggaran pada umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun, Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Suatu usulan anggaran harus ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran dan Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu: Anggaran Operasional yaitu anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan dan Anggaran Modal yaitu anggaran yang menunjukkan anggaran jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan dan sebagainya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban pemerintah daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparansi, akuntabilitas, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta pendapatan yang sah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah (Mardiasmo, 2002).

Jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi sebagai berikut. Jenis Pajak Provinsi, yang terdiri dari: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

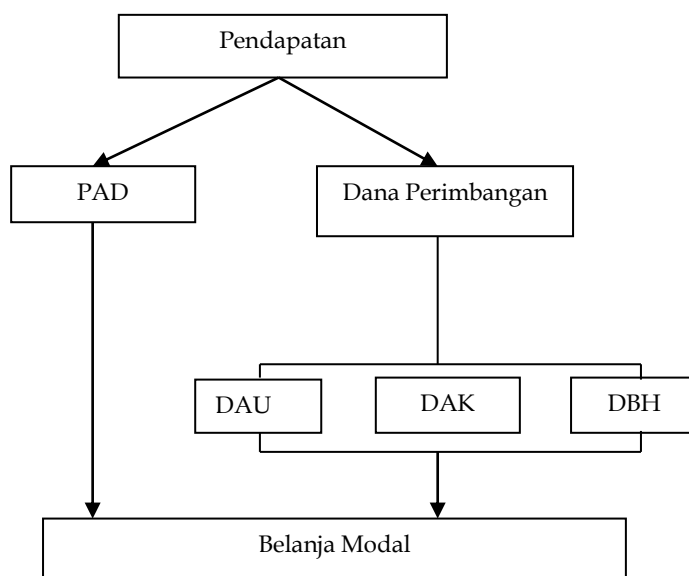
Dana Perimbangan

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) itu terdiri dari: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Belanja Modal

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sedangkan berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2005 menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori umum yaitu: (Syaeful, 2006 dan Yovinta, 2011). Belanja modal tanah, Belanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang juga merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Indikator penting keberhasilan kemampuan keuangan daerah tercermin dalam kemampuan suatu daerah dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD) nya untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan di daerah tersebut. Keberhasilan desentralisasi fiskal jelas mensyaratkan keberhasilan daerah dalam mengelola potensi keuangan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah (Soekarwo, 2003).

Oktora dan Pontoh (2013) mengemukakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan Jaya dan Dwirandra (2014) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

pada tahun 2006-2011. Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

Ferdian (2013), melakukan penelitian di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat pada tahun anggaran 2007-2011 mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja daerah di kabupaten dan kota Sumatera Barat Tahun anggaran 2007-2011, dana perimbangan positif dan signifikan pada belanja daerah di kabupaten dan kota Sumatera Barat Tahun anggaran 2007-2011, serta lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja daerah di kabupaten dan kota Sumatera Barat Tahun anggaran 2007-2011. Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah suatu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya.

Penelitian ini dilkakukan diseluruh Kabupaten/Kota di wilayah Gerbang Kertosusila dalam kurun waktu 2012 - 2016. Penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Gerbang Kertosusila .

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Gerbang Kertosusila. Penulis memperoleh data yang dibutuhkan dari Laporan Realisasi APBD selama tahun anggaran 2012-2016.

Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2010) berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah populasi tersebut, jadi populasi ini merupakan sampel tersebut. Penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan metode sensus, yaitu dengan mengambil seluruh populasi yaitu sebanyak 7 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Gerbang Kertosusila. Alasan pemilihan metode sensus agar hasil penelitian lebih representatif.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Jenis data Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan

adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Gebang Kertosusila tahun 2012 - 2016 yang ada dilaporan realisasi anggaran. Sumber Data Dalam penelitian yang telah dilakukan sumber diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mengenai data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Gerbang Kertosusila periode 2012-2016. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data sekunder ini menggunakan dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan dan pencatatan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No. 32 tahun 2004). Penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah (RD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan yang Sah. Menurut Widodoasri (2016) berikut perhitungan PAD didasarkan atas proporsi/persentase sebagai berikut:

$$PAD = \frac{PAD}{TotalPendapatan} \times 100\%$$

Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan desentralisasi diperlukan Dana perimbangan guna mengatasi ketimpangan fiskal. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai seluruh kebutuhan daerah. Menurut Widodoasri (2016) berikut perhitungan Dana Perimbangan didasarkan atas proporsi/persentase sebagai berikut:

$$DP = \frac{DanaPerimbangan}{TotalPendapatan} \times 100\%$$

Variabel Dependen

Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum. Menurut Widodoasri (2016) berikut perhitungan Belanja Modal didasarkan atas proporsi/persentase sebagai berikut:

$$BM = \frac{BelanjaModal}{TotalBelanja} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

(Sugiyono, 2009:147). Analisis statistik deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan serta memberikan gambaran atau deskripsi pada suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan penggunaan model regresi dan kelayakan variabel bebas. Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian penyimpangan asumsi klasik terhadap model regresi yang telah diolah yang terdiri dari:

Uji Normalitas

Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel pada penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis normal probability plot dan uji Kolmogorov-Smirnov, kriteria pengujian: Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data normal. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal.

Uji Multikolinearitas

Ghozali (2006) berpendapat mengenai pengujian Multikolinearitas, jika model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance value $> 0,01$ dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Untuk mengatasi masalah multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara yaitu menambahkan sampel, melakukan transformasi variabel, dan mengeluarkan satu variabel atau lebih yang memiliki korelasi yang tinggi dengan variabel lain.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier, terdapat korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji statistik ini yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan cara melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (S-RESID). Apabila pada titik-titik pada grafik tersebut menyebar secara acak tidak membentuk pola dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Pengujian Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah persyaratan dari uji asumsi klasik telah terpenuhi. Dalam penelitian ini regresi linier berganda digunakan untuk menguji Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Adapun persamaan model regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$BM = a + \beta_1 PAD + \beta_2 DP + e$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal

a : Konstanta

β : Koefisien Regresi

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DP : Dana Perimbangan

E : Standar Error

Pengujian Hipotesis

Pengujian Parsial (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Apabila nilai signifikansi uji $t < 0,05$, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji $t > 0,05$, maka H_0 diterima. Hal ini berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian Simultan (Uji F)

Uji F dikenal dengan Uji model/Anova yang digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan atau tidak dan uji ini menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, dimana ditentukan jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan. Jika nilai probabilitas $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan.

Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) merupakan ukuran untuk menguji seberapa jauh model regresi mempunyai kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen dengan memiliki nilai koefisien determinasi (R²) antara nol dan satu. Semakin besar nilai R² atau mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat, namun sebaliknya jika semakin kecil nilai R² atau mendekati nol berarti menunjukkan pengaruh yang semakin melemah.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berikut merupakan perhitungan menggunakan komputer dengan aplikasi program *Statistical Program for Social Science (SPSS) 20* sebagai berikut:

Tabel 4
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	35	.051	.610	.24271	.161319
DP	35	.028	.828	.55309	.178453
BM	35	.302	.557	.45900	.059910
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dilihat hasil pengolahan data menghasilkan nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standard deviasi atas variabel-variabel yang digunakan. Tabel 4 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ada 35 data observasi yang digunakan, dengan rincian variabel dependen dan independen sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai maksimum sebesar 0,610 atau sebesar 61%. memiliki nilai rata-rata (*mean*) 0,24271 atau sebesar 24,271% dan memiliki nilai standar deviasi 0,161319 atau sebesar 16,1319%. Nilai standar deviasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,1319% lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) 24,271% menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Dana perimbangan Dana Perimbangan memiliki nilai rata-rata (*mean*) 0,55309 atau sebesar 55,309%. Dan memiliki nilai standar deviasi 0,178453 atau sebesar 17,8453%. Kecilnya nilai standar deviasi sebesar 17,8453% dibandingkan dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 55,309% menunjukkan bahwa distribusi cenderung normal.

Belanja Modal Belanja Modal memiliki rata-rata (*mean*) 0,45900 atau sebesar 45,9%, dan nilai standar deviasi 0,059910 atau sebesar 5,991%. Nilai standar deviasi sebesar 5,991% ini lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 45,9% yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan grafik Normal Probability Plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar jauh di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal atau dengan kata lain model regresi memenuhi asumsi normal. data dimana $N = 35$ dan nilai signifikansi 0,790 yang lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 0,05$, sehingga disimpulkan residual memenuhi asumsi distribusi normal. Hal ini berarti data terdistribusi secara normal, hasilnya konsisten dengan uji grafik *normal probability plot* yang dilakukan sebelumnya, sehingga model regresi ini memenuhi uji normal.

Uji Multikolinearitas

Dari uji multikolinearitas masing-masing variabel independen tersebut menunjukkan nilai tolerance kurang dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan dari hasil multikolinearitas tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai D-W sebesar 1,467. Karena hasil nilai D-W berada diantara -2 sampai +2 maka hasil uji tersebut menunjukkan bahwa model penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot diketahui tidak membentuk pola tertentu serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi berikut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dari data yang diolah dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	.693	.082			
1	PAD	.394	.112	1.061	3.504	.001
	DP	.251	.102	.748	2.470	.019

Sumber: Data sekunder diolah

Dari output SPSS pada tabel di atas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$BM = 0,693 + 0,394PAD + 0,251DP + \epsilon$$

Nilai konstanta sebesar 0,693 artinya apabila nilai variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan bernilai 0 maka Anggaran Belanja modal sebesar 0,693. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 0,394, artinya setiap penambahan variabel Pendapatan Asli Daerah maka akan naik pula anggaran belanja modal sebesar 0,394. Variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 0,251, artinya setiap penambahan variabel Dana Perimbangan maka akan naik pula anggaran belanja modal sebesar 0,251.

Uji Hipotesis Pengujian Simultan (Uji F)

Tabel 3
Uji Signifikan Simultan

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	.037	2	.018	6.864	.003 ^b
	Residual	.085	32	.003		
	Total	.122	34			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DP, PAD

Sumber: Data sekunder diolah

Setelah dilakukan uji kelayakan model (*Goodness of Fit*) di atas, hasil regresi Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Gerbang Kertosusila periode 2012-2016 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 6,864 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Dengan nilai signifikansi < 0,05, maka model persamaan regresi dalam penelitian layak dan dapat diepergunakan untuk menjelaskan pengaruh kinerja pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal.

Uji Parsial (Uji T)

Dari tabel 10 diperoleh nilai t-hitung untuk variabel PAD sebesar 3,504 dan untuk variabel DP sebesar 2,470. Pengujian ini dapat dilihat dari nilai signifikansi. Pada tabel *coefficients*, nilai *sig.* dari variabel PAD sebesar 0,001 dan variabel DP sebesar 0,019 dimana $0,001 < 0,05$, sedangkan $0,019 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel PAD dan DP berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dipengaruhi oleh PAD dengan persamaan matematis atau model analisis regresi berganda yang dapat dibentuk, sebagai berikut:

$$BM = 0,693 + 0,394PAD + 0,251DP + \varepsilon$$

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.548 ^a	.300	.256	.051659

Sumber: Data sekunder diolah

Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,256 yang berarti 25,6% variasi atau perubahan dalam waktu tingkat belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel independen PAD dan DP. Sedangkan sisanya sebesar $(100\% - 25,6\% = 74,4\%)$ dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Moda

Berdasarkan hasil uji t terhadap Hipotesis 1 dalam penelitian ini yaitu untuk membuktikan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Gerbang Kertosusila. Terdapat pada tabel 10 menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahwa memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,061 dan nilai t-hitung sebesar 3,504 dengan nilai Sig. 0,001 yang berarti nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah ini lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,001 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima atau H_0 ditolak. Dan adanya diterima H_1 menunjukkan arah koefisiennya positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah secara individu berpengaruh positif terhadap tingkat belanja modal sehingga dalam penelitian ini H_1 diterima. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Hasil ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yulia (2007), melakukan penelitian terhadap sampel se-jawa bali pada tahun anggaran 2004-2005 mengungkapkan PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Jawa Bali tahun anggaran 2004-2005. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur maka Kabupaten/Kota tersebut akan semakin mandiri.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t terhadap Hipotesis 2 dalam penelitian ini yaitu untuk membuktikan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Gerbang Kertosusila. Dari tabel tersebut terlihat untuk variabel independen Dana Perimbangan bahwa memiliki nilai regresi sebesar 0,748 dan nilai t-hitung sebesar 2,470 dengan nilai signifikansi sebesar 0,019 yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,019 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dengan diterimanya H_1 menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota di Gerbang Kertosusila.

Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dikarenakan sebagian besar Kabupaten/Kota di Gerbang Kertosusila masih bergantung terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah pusat yang nilainya cukup besar dalam memenuhi anggaran belanja daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan maka semakin meningkat pula belanja modal, begitu pula sebaliknya jika dana perimbangan semakin rendah maka belanja modal juga semakin rendah. Di karenakan pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi sehingga Pemerintah Daerah tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah pusat. Seperti Kota Surabaya dan Kota Malang, memiliki penghasilan Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan dana perimbangan tidak mempengaruhi keputusan Pemerintah Kabupaten/Kota di Gerbang Kertosusila selama kurun waktu 2013-2016 untuk meningkatkan atau menurunkan alokasi belanja modal.

Keuangan daerah menggambarkan kemampuan setiap daerah tersebut dalam membiayai kegiatan seperti pemerintahan, infrastruktur, sarana dan prasarana, dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah, maka tingkat ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah pusat akan semakin tinggi, begitupun pula sebaliknya. Apabila Dana Perimbangan suatu daerah meningkat, maka Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat meningkatkan Belanja Modalnya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu Erna Susanto (2017), melakukan penelitian terhadap sampel Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun anggaran 2013-2015 mengungkapkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal tahun anggaran 2013-2015. Dikarenakan rata-rata Kabupaten/Kota Jawa Timur masih bergantung terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah pusat dalam mengalokasikan Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, Hasil ini menandakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Gerbang Kertosusila. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama pada Pemerintah daerah yang berasal dari kekayaan daerah itu sendiri. Hal ini berarti jika semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan oleh Pemerintah daerah maka semakin meningkat juga Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Gerbang Kertosusila. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur kemandirian suatu daerah dan keberhasilan Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat di daerah.

Hasil Penelitian telah menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,019 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, Hasil ini menandakan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Gerbang Kertosusila. Pengalokasian dan bantuan kepada daerah dari Pemerintah pusat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah, mengupayakan keseimbangan bantuan antar daerah untuk mendorong ke arah yang merata. Hasil ini berarti dapat dikatakan sebagian besar Kabupaten/Kota di Gerbang Kertosusila sangat bergantung pada Dana Perimbangan sehingga pemerintah pusat berupaya untuk memenuhi semua pembiayaan dan belanja terutama kebutuhan Belanja Modal Pemerintah daerah.

Saran

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Gerbang Kertosusila diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD. Untuk dapat mengupayakan terjadinya presentase PAD yang tinggi, hal ini dapat dilakukan jika menciptakan inovasi-inovasi yang menarik. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan PAD dengan sebaik mungkin untuk alokasi belanja modal karena PAD masih banyak digunakan untuk alokasi belanja lainnya yang kurang memberikan manfaat. Apabila Pemerintah Daerah dapat merealisasikan PAD lebih tinggi daripada anggaran yang telah ditentukan maka semakin efektif kinerja PAD tersebut. Belanja Modal yang dilakukan harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik dan mampu menghasilkan *income* yang tinggi bagi daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Gerbang Kertosusila diharapkan dapat mengelola Dana Perimbangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat agar Belanja Modal setiap periodenya terus meningkat. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mengkaji lebih mendalam terkait aspek kualitatif sehingga dapat dinilai tingkat efektivitas kebijakan fiskal Pemerintah daerah melalui APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Akbar, T. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi*. Bandung.
- Bahtiar, A. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Darise. N. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah :Pedoman Untuk Eksekutif Dan Legislative Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah Dan 15 Permendagri*. Edisi 2. Jakarta : PT Indeks.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Darwis, E., T., R., 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi* 3(1): 1-23.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Delapan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kadafi, M., E. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi*. Bandung.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi,PerencanaanStrategi, dan Peluang*. Erlangga. Jakarta

- Kusnandar, Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Masdjodo, G., N, dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Jurnal TEMA* 6(1): 32-50.
- Mutahara, R. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007-2009)*. Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nuarisa, S.A. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. Semarang.
- Okto, Fahri Eka dan Winston Pontoh. 2013. *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*. *Jurnal Accountability* Vol. 2 No. 1.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Soekarwo, 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabet. Bandung
- Supomo, Bambang dan Nur Indriantoro, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Penerbit BFEE UGM.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- _____ No. 32 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- _____ No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan.
- _____ No. 24 Tahun 2005 tentang Belanja Modal
- _____ No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Bagi Hasil
- _____ No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- _____ No. 23 Tahun 2014 tentang Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- Walidi. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Uum Terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara)*. Tesis USU. Sumatera Utara.